

JURNAL

SOSIOLOGI REFLEKTIF

Volume 7, Nomor 2, April 2013

TRANSFORMASI TAREKAT KONVENSIONAL DI INDONESIA:
BERTASAWUF *ALA* HABIB MUHAMMAD LUTHFI BIN YAHYA

Achmad Zainal Arifin

CIVIL RELIGION;
ANTARA ROUSSEAU DAN BELLAH

Ahmad Norma Permata

KIAI DAN POLITIK:
KETERLIBATAN KIAI MADURA DALAM POLITIK PRAKTIS

Muh. Syamsuddin

ILMU PENGETAHUAN DAN PERADABAN:
STUDI PEMIKIRAN IBN KHALDUN

Syarifuddin Jurdi

AGAMA DAN PARIWISATA

Adrian M. Puasa



LABORATORIUM SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 7, Nomor 2, April 2013

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting : Muryanti, M.A
Sekretaris Penyunting : Napsiah, M.Si
Penyunting Pelaksana : Dadi Nurhaedi, M.Si, Ahmad Zainal Arifin, M.A, M.Si, Drs. Musa, M.Si, Sulistyarningsih, M.Si, Ambar Sari Dewi, M.Si, Dr. Yayan Suryana, M.Ag
Sekretariat : Lusiana, MM, Listiyana, S.Sos
Desain Sampul & Tata Letak : Gramasurya
Diterbitkan oleh : Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi : Laboratorium Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta
Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571
Email: sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan
sosiologirefleksif@gmail.com

Sosiologi Reflektif adalah jurnal yang dikelola oleh Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Media ini menekankan kajian seputar persoalan-persoalan sosial. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial baik yang bersifat teoritis, kritik, reflektif, opini, dan berbagai ide-ide dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 20 halaman kuarto, spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), catatan kaki, dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap bersama asal universitas atau lembaga profesional, alamat lengkap dan alamat email, nomor telepon, dan beberapa kalimat biografi penulis.

DAFTAR ISI

Transformasi Tarekat Konvensional di Indonesia: Bertasawuf <i>Ala Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya</i> <i>Achmad Zainal Arifin</i>	1
Civil Religion: Antara Rousseau dan Bellah <i>Ahmad Norma Permata</i>	29
Kiai dan Politik: Keterlibatan Kiai Madura dalam Politik Praktis <i>Muh. Syamsuddin</i>	47
Revitalisasi Tradisi, Pariwisata dan Skema Ekonomi-Politik Kota <i>Akhmad Ramdhon</i>	73
Dampak Pembangunan Desa Wisata terhadap Nelayan: Di Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat <i>Zessy Ardinal Barlan</i>	87
Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan <i>Aryan Torrido</i>	101
Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pasca Bencana <i>Sudaru Murti</i>	119
Peranan Perempuan dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga: Di Tempursari, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah <i>Nur Hidayah, Fuji Lestari, V. Indah Sri Pinasti,</i> <i>Poerwanti Hadi Pratiwi</i>	133
Model Kerjasama Lembaga Swasta, Pemerintah dan Pendidikan Tinggi <i>Derajad S.Widhyarto, Ambar Pertiwiningrum,</i> <i>Oki Rahadianto Sutopo</i>	157

Sinergisitas Masyarakat-Pemerintah-Swasta dalam Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan <i>Yudha P. Heston, Ahmad Yusuf Aljunaid</i>	181
Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Peradaban: Studi Pemikiran Ibn Khaldun <i>Syarifuddin Jurdi</i>	201
Gagasan Jürgen Habermas dalam Empat Puisi Mustofa Bisri <i>Mustari</i>	233
Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan <i>Andy Dermawan</i>	247
Ironi Strategi (Survive) Petani Garam di Desa Gersik Putih <i>Khalifi</i>	263
Agama dan Pariwisata <i>Adrian M. Puasa</i>	283

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, dengan segala puji dan rahmat Allah SWT., Jurnal Reflektif Volume 7, Nomor 2, April 2013 ini dapat terbit di hadapan pembaca yang budiman. Volume ini memiliki perbedaan yang signifikan daripada edisi yang sebelumnya. Niat kami yang teguh untuk menjadikan jurnal ini lebih berkualitas dengan menjadi "jurnal yang terakreditasi" memotivasi kami untuk melakukan perbaikan. Kami mohon dukungan dan doa restu dari pembaca budiman untuk menjadikan Jurnal Sosiologi Reflektif yang kita cintai ini menuju jurnal yang terakreditasi. Beberapa artikel yang dimuat dalam edisi ini mengkaji fenomena sosial yang kompleks.

Ahmad Zainal Arifin menulis tentang Transformasi Tarekat Konvensional di Indonesia: Bertasawuf ala Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya. Pada masa sekarang banyak berkembang keberagaman Islam. Termasuk pertumbuhan popularitas tasawuf di Indonesia yang dikembangkan dengan cara modern; workshop, pelatihan dan training. Hal ini menunjukkan meningkatnya komitmen umat Islam terhadap kesalehan lahiriah. Akan tetapi pada kenyataannya tumbuh gerakan Neo Salafi, notabene menentang pertumbuhan gerakan tasawuf tersebut. Dengan demikian muncul kategori keberagaman; (1) Tasawuf Konvensional (Tarekat); (2) Tasawuf Non Tarekat dan (3) Neo Salafi. Zainal Arifin akan membahas tentang transformasi tarekat konvensional dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat modern sebagaimana yang ditulis oleh Habib Luthfi.

Ahmad Norma Permata menulis tentang Civil Religion; antara Rousseau dan Bellah. Dalam analisisnya disimpulkan bahwa konsep agama sipil yang ditawarkan oleh J. J. Rousseau dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Bellah merupakan terobosan baru untuk membangun mekanisme hubungan yang lebih baik antara agama dan politik. Upaya tersebut perlu dilakukan, dalam situasi kehidupan yang plural. Agama dan politik bukan hanya saling menjaga untuk menghadirkan kedamaian namun juga saling memprovokasi untuk menghasilkan kekacauan.

Muh. Syamsuddin mengkaji tentang Kiai dan Politik: Keterlibatan Kiai Madura dalam Politik Praktis. Paska lengsernya Suharto muncul elit-elit baru dan mulai naiknya para kiai dalam kancah politik di Madura. Adanya tokoh-tokoh politik yang berasal dari pesantren tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi. Kekuatan jaringan kiai pada aspek sosiokultural dan agama berasal dari santri, wali kiai sebagai penentu bangunan kharismatik kiai. Dalam kedudukannya tersebut kiai memiliki peran ganda, yakni sebagai elit agama dan elit politik. Akan tetapi keberadaan mereka pun tidak lepas dari kritik karena berpolitiknya kiai mengalami pergeseran dari nilai-nilai kultural menuju pada orientasi nilai ekonomi. Sehingga menurut penulis politik kiai perlu dikembalikan pada nilai-nilai keislaman.

Akhmad Ramdhon menulis Revitalisasi Tradisi, Pariwisata dan Skema Ekonomi, Politik Kota. Menurut penulis skema politik pariwisata diharapkan menjadi energi positif bagi proses lanjutan pengembangan kota secara makro. Sekaligus mampu menggerakkan juga sektor riil yang menjadi titik tolak gerakan ekonomi masyarakat secara luas.

Zeszy Ardinal Barlan menulis artikel yang berjudul Desa Wisata dan Dampaknya terhadap Masyarakat Nelayan (di Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat). Menurut penulis pembangunan pariwisata saat ini digiatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Akan tetapi pada kenyataannya peningkatan pendapatan itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan justru menyingkirkan masyarakat yang seharusnya meningkat kesejahteraannya, yakni nelayan.

Aryan Torrido menulis Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan. Manusia merupakan sumber daya yang menjadi modal pembangunan. Tentunya jika manusia tersebut berkualitas. Akan tetapi menjadi beban jika tidak berkualitas. Oleh karena itu sumber daya manusia perlu terus dikembangkan. Terutama tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup serta etos kerjanya, yaitu etos kerja yang mencuat dari orientasi nilai-nilai budaya masyarakat.

Sudaru Murti menulis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pasca Bencana. Penulis menyimpulkan bahwa penguatan penanganan pasca bencana tanpa langkah profesional baik melalui sistem interaksi dan sistem tindakan sesuai dengan struktur yang ada, dapat dikatakan sebagai jejaring sosial. Ketangguhan dan ketegaran masing-masing kelompok dan individu, sebagai pijakan dalam *manage* keragaman kepribadian di lokasi kebencanaan. Oleh karena itu penguatan

kelembagaan dalam kebersamaan kehidupan, berlandaskan pada nilai-nilai religi seperti cinta kasih, tawakal, sabar dan nilai-nilai luhur seperti; peduli, tanggap dan terampil sebagai modal dalam menyikapi setiap musibah kebencanaan sangat perlu dilestarikan.

Nur Hidayah, Puji Lestari, V. Indah Sri Pinasti dan Poerwanti Hadi Pratiwi menulis tentang Peranan Perempuan dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga. Kajian yang dilakukan penulis adalah sosiologi keluarga. Mereka menekankan bahwa keluarga adalah bagian dari sistem sosial yang paling kecil. Dengan demikian masing-masing anggota keluarga memiliki perannya masing-masing yang mendukung keberadaan sistem tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan masih berperan dalam kerja-kerja domestik, sedangkan laki-laki masih mendominasi untuk bekerja di sektor publik. Walaupun demikian, peranan perempuan dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi tidaklah bisa dipandang sebelah mata.

Derajad S. Widhyarto, Ambar Pertiwinigrum dan Oki Rahadianto Sutopo menulis artikel Model Kerjasama Lembaga Swasta, Pemerintah dan Pendidikan Tinggi. Penulis menekankan bahwa lembaga dalam berbagai bentuk; organisasi internasional, perusahaan maupun pemerintah pusat tidak berdiri sendiri. Lembaga tersebut menganggap kerjasama sebagai "arena" yang terlekat dengan struktur serta konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian pengembangan SOP (*standar operating procedur*) perlu dipertimbangkan sesuai dengan konteks serta kekhususan masing-masing lembaga.

Yudha P. Heston dan Ahmad Yusuf Aljunaid menulis artikel Peningkatan Peran, Kapasitas dan Sinergi Masyarakat-Pemerintah-Swasta dalam Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan. Artikel ini menekankan bahwa keberhasilan program penataan kawasan kumuh perkotaan sangat tergantung pada kemampuan masyarakat dalam partisipasi pembangunan infrastruktur. Hal terpenting proses pelibatan masyarakat secara penuh dalam proses pembangunan melalui pembentukan kelompok usaha dan sejenisnya.

Artikel yang ditulis oleh Syarifuddin Jurdi berjudul mengkaji Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Peradaban: Studi atas Pemikiran Ibn Khaldun. Ilmu pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari cara berpikir (metode ilmiah). Dengan menggunakan metode ilmiah merupakan langkah awal untuk melakukan kajian ilmiah. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun adalah sosok ilmuwan pioner dalam

berpikir ilmiah. Ibnu Khaldun melakukan kritik terhadap cara berpikir ilmuwan terdahulu.

Mustari menulis Gagasan Jürgen Habermas dalam Empat Puisi Mustofa Bisri. Dalam analisisnya penulis menegaskan bahwa dalam menyampaikan gagasan kritisnya kedua penulis memiliki perbedaan. Terkait dengan paradigma kritis, Habermas mengatakan bahwa manusia diobyektifikasi dengan menggunakan bahasa, sedangkan Bisri menyimpulkan bahwa penguasa sangat "menguasai" rakyatnya, sedangkan rakyat tidak berkuasa atas apa pun, hanya membebek saja.

Andy Dermawan menulis Dialektika Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan Perspektif Sosiologi. Penulis menjelaskan tugas teori adalah menciptakan sejarah babak baru manusia yang terbebas dari dominasi apapun. Teori kritis dan sosiologi pengetahuan, bukan sekadar berurusan dengan benar atau salah tentang fakta atau suatu realitas sosial yang terjadi, tetapi bertugas memberikan proses penyadaran atau perspektif tentang bagaimana kepercayaan masyarakat membentuk realitas sosial. Dengan kata kunci implementasi teori kritis dan sosiologi pengetahuan adalah kesadaran.

Demikian gambaran secara umum jurnal yang akan sidang pembaca nikmati edisi ini. Semoga apa yang tertuang dalam kajian ini memberikan sumbangan yang berarti bagi pengetahuan. Selamat membaca. *Wallahu a'lam bi shawab*

Wassalamualaikum wr. wb

Redaksi

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF



PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PASCA BENCANA

Sudaru Murti

Dosen Prodi Sosiologi STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta
Alamat Email: murtizagita@yahoo.co.id

Abstract

The article discusses about community action system in facing disaster potential in their surrounding. Disaster that appears, both disaster geological, disaster hidrometrologi, biological disasters, technological disasters or environmental catastrophes, certainly left traumatized and losses, material disability. Existing social institutions, will cover the the possibility of disorder and disorganization. This paper is intended to unite for the understanding appreciation and the institutions whitin social network to mobilize within the locality as well as the driving factor of alteration within the development organization that makes partipation in society, so then obtained an embryonic introduction to social capital for post-disaster.

Key Words: Mitigation, Social Capital, Social Networking and Institution

Intisari

Artikel ini membahas sistem tindakan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di lingkungannya. Bencana yang muncul, baik bencana geologi, hidrometrologi bencana, bencana biologis, bencana teknologi atau bencana lingkungan, tentu meninggalkan trauma dan kerugian, cacat material. Ada lembaga-lembaga sosial, tidak menutup kemungkinan untuk mengatasi gangguan dan kesemrawutan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman untuk memobilisasi lembaga jaringan sosial dalam wilayah serta faktor pendorong perubahan dalam pengembangan organisasi yang membuat

partisipasi dalam masyarakat. Diharapkan mendapatkan pengenalan embrio untuk modal sosial pasca-bencana.

Kata Kunci: Mitigasi, Modal Sosial, Jejaring Sosial dan Kelembagaan

Pendahuluan

Bencana tsunami di Aceh pada bulan Desember 2004 merupakan awal dari kisah bencana pada dekade terakhir ini. Kemudian disusul dengan bencana gempa bumi Mei 2006 di DIY yang merenggut hampir setengah juta jiwa, meninggalkan ribuan janda dan hampir satu juta anak yatim dengan kerugian harta benda yang mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)*, fenomena musibah di Indonesia lima tahun terakhir dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: (1) bahaya beraspek geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung api, longsor; (2) bahaya beraspek hidrometeorologi, antara lain: banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang; (3) bahaya beraspek biologi, antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman; (4) bahaya beraspek teknologi, antara lain: kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kegagalan teknologi dan (5) bahaya beraspek lingkungan, antara lain: kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan kejadian bencana yang fenomenal seperti lumpur Lapindo di Sidoarjo hingga kini belum terselesaikan.

Selama ini pemahaman sinerginitas yang baik mengenai penanganan pasca bencana yang berakibat peningkatan angka kematian, angka sakit jiwa dan angka pemudaran ikatan struktur sosial, masih dirasakan belum maksimal. Kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk kerentanan. Dimana pada kondisi itu suatu komunitas atau masyarakat berada pada kondisi tidak mampu dalam menghadapi ancaman bahaya.

Saat ini berbagai kemajuan teknologi sangat memungkinkan manusia untuk melakukan perkiraan-perkiraan pra-bencana. Selain itu berbagai upaya-upaya terus ditingkatkan untuk meringankan dampak yang ditimbulkan. Namun tetap saja setiap bencana dapat menimbulkan dampak yang cukup traumatis dan berkepanjangan. Kekuatan alam yang sangat dahsyat, jika dihadapkan pada struktur kehidupan manusia sangat rentan terhadap dampak yang luar biasa menghancurkan. Gambaran peristiwa bencana tornado di Amerika, tetap meninggalkan kehancuran baik fisik maupun sosial. Seiring

ungkapan yang dikemukakan Susanna Hoffman terhadap badai di Amerika:

Various social and cultural changes almost inevitably ensue from a disaster, and Katrina and Rita are showing us them all. That the physical layout of a community is altered, is clearly apparent, but with the physical layout, so, too, is the social structure fractured, never to be rebuilt in the same form again. The economy of a community dissolves, with no workplaces, no transport, no clients left, so that bayou farmer, vibrant jazz musician, Cajun cook, factory worker, shop owner, housemaid and gardener often drift away. New political leader arise, and new political agendas are set in motion. Sometimes old leaders are sacrificed, both locally and as Arabian horse shows. Survivors become marginalized from the communities in which they once participated.¹

Berhubungan dengan berbagai peristiwa kebencanaan yang terjadi dewasa ini, tampak belum menunjukkan penanganan yang terintegrasi dengan baik. Hal itu tampak dari masih banyak yang mengalami berbagai keterbatasan dalam penanganan pada saat terjadi bencana, apalagi kepemilikan berbagai sumber daya yang dimiliki masih sangat terbatas. Terkait dengan pendekatan yang dilakukan dalam mempersiapkan situasi dan kondisi kebencanaan, banyak hal yang perlu diperhatikan secara seksama baik oleh sikap perilaku individual dan institusional, perkembangan kebudayaan, struktur politik dan kekuasaan, maupun struktur ekonomi yang berkembang. Landasan kinerja yang dilakukan, masih bersifat situasional dan kondisional terhadap penanganan kerugian materi dan kecacatan fisik belum menyentuh pada sosial-psikologis, apalagi antisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

Dengan demikian tidak keliru berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2003 tentang penanganan bencana, masih banyak dirasakan kendala yang bersifat birokratis dan lebih bersifat gugus kendali. Sebagai pembanding dari berbagai hasil studi kebencanaan yang dikemukakan oleh Oliver Smith (2006) yang berhubungan dengan tingkat integrasi masyarakat dan derajat pengetahuan kewilayahan lokal menjadi landasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan *capacity building* bagi kemampuan pemulihan penataan lingkungan dan meminimalisir kerugian kebencanaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan tanggapan dari sisi budaya

1 Lihat Susanna M Hoffman, 2005

yang berhubungan dengan konstruksi pemaknaan yang berhubungan dengan nilai-nilai kepercayaan, tidak menutup kemungkinan berhubungan dengan tindakan supranatural. Determinasi yang diyakini sebagai nilai ini, tidak terlepas atas *punishment* atas perilaku maupun takdir terhadap nilai-nilai fatalistik dalam menyikapi setiap bencana terjadi. Pengetahuan rasionalitas yang berkembang, masih terbatas pada keyakinan akan kemurkaan kuasa adi kodrati. Belum menyentuh hukum sebab-akibat sikap perilaku terhadap perlakuan akan tata lingkungan dan keseimbangan yang senantiasa harus tetap dijaga dan dilestarikan.

Pembentukan SATKORLAK berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dan SATLAK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 diharapkan bisa menyentuh seluruh elemen terkait yang peduli terhadap bencana. Sungguh pun terhadap kenyamanan di atas perlu dilakukan peningkatan perhatian dan upaya berbagai penggalian sumber daya yang ada di masyarakat untuk dijadikan kekuatan maupun modal dalam usaha pemupukan kesadaran dan kebersamaan, bahwa masyarakat yang tertimpa bencana bisa bangkit dan mandiri. Menurut Bourdieu (2006); modal tidak hanya sekedar memiliki pengertian dalam bentuk materiil, melainkan dapat dikategorikan, yaitu (a) modal ekonomi (*economic capital*) menyangkut berbagai keterbatasan yang memerlukan pengelolaan dalam mendapatkan maksimalisasi manfaat dan ketepatan penggunaan. (b) modal kultural (*cultural capital*) sebagai kesepakatan-kesepakatan dalam pergaulan dan interaksi sosial seperti; kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. (c) modal sosial (*social capital*) yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan kehidupan dalam masyarakat ataupun organisasi. Menurut Jousairi Hasbullah yang menyitir pendapat Francis Fukuyama dalam *social capital and development*, dengan modal sosial yang kuat, masyarakat akan menyatukan kekuatan dan energi dalam membangun dan menghadapi kebencanaan.

Ada empat komponen utama modal sosial yang dapat memperkuat dalam menghadapi kebencanaan; pertama, optimalisasi kemampuan membangun kembali semangat resiprokal, yaitu semangat kebersamaan untuk saling memberi dan membantu. Kecenderungan saat ini, daya resiprokal tersebut semakin lemah, dipengaruhi adanya kelompok kepentingan yang dilakukan yaitu setiap ada bencana dijadikan sebagai obyek wisata. Pengembangan tersebut tidak menjadi persoalan sepanjang tidak mengganggu aktivitas kedaruratan dan membantu

dalam penanggulangan kebencanaan yang sedang terjadi. Kedua, bagaimana membangun kembali *trust*. Kenyataan saat ini, rasa saling mempercayai (*trust*) antar kelompok masyarakat maupun antar instansi semakin tipis dalam menyikapi adanya kebencanaan. Ketiga, bagaimana kita mampu menghidupkan kembali jaringan sosial yang menjembatani (*bridging*) untuk mensubstitusi jaringan sosial yang tertutup (*bonded*). Sedangkan pengertian *bondedsocial capital*, yaitu masyarakat yang hidup dalam rekatan primordial dan kelompok yang sempit. Sementara yang diharapkan dapat memperkuat dan memperkokoh *bridging social capital*, yaitu suatu bentuk kekohesifan sosial kelompok yang bersimbiosis dengan dimensi eksternal secara positif, yang mendukung karakter amanah, terbuka dan altruistis. Keempat, berupaya membangun kembali semangat toleransi dan semangat kemanusiaan dengan lebih kuat. Memobilisasi modal sosial bangsa sebagai tanggung jawab semua pihak, terutama organisasi-organisasi berbasis keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan tentu saja pemerintah sebagai fasilitatornya. Determinasi fungsi berbagai komponen-komponen modal sosial, idealnya dapat tumbuh di tengah masyarakat yang terkena bencana.

Indikasi yang paling menarik di mana semakin mendalamnya kesadaran kepedulian masyarakat, terbukti setiap ada bencana baik geologi, bencana biologi, bencana teknologi, bencana hidrometeorologi maupun bencana lingkungan sosial; masyarakat dengan terampil, tangkas dan ringan untuk membantu pihak yang terkena musibah, baik berupa materiil maupun imaterial. Langkah gerak operasional yang bagaimanakah untuk dirapatkan dan dijalin, setiap menghadapi musibah kebencanaan. Begitupun yang sedang dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab, sebagai contoh yang tidak terkecuali dan perlu diperhatikan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mempersatukan pemahaman, penguatan dan pengamanan kelembagaan dalam jejaring sosial dalam memobilisasi lokalitas maupun faktor pendorong alterasi dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan yang mempermudah pembentukan kesadaran berpartisipasi di masyarakat sehingga diperoleh suatu embrio gagasan dan pengenalan secara saksama terhadap pengertian modal sosial pada pasca bencana.

Struktur Sosial dalam Sistem Sosial Masyarakat

Masyarakat secara umum, jika mengetahui adanya bencana bagi saudara-saudaranya, akan dengan mudah tergugah terhadap nilai-nilai

kasih dan kebersamaan untuk membantu dan meringankan penderitaan. Di mana terabaikan egoisme dan individualismenya, tampak secara sukarela baik dalam bentuk materi maupun immaterial, akan memberi pelayanan dan bantuan secara spontan dan sporadis. Terbukti setiap berlangsung bencana di lokasi bencana, masyarakat bersama berbagai lembaga-lembaga sosial tidak canggung maupun sungkan terjun membantu mengatasi bencana. Begitupun hasil pengamatan dan studi yang dilakukan oleh Oliver Smith (2006) menyatakan bahwa derajat integrasi masyarakat dan pola kesadaran lokalitas, merupakan kekuatan yang mengikat terhadap pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana serta mampu meminimalkan berbagai kerugian yang dialaminya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Mengingat asumsi yang dikemukakan; menyatakan bahwa setiap pengetahuan yang dimilikinya sebagai sistem nilai yang mengandung pilihan-pilihan tindakan-tindakan adaptif dalam perjuangan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menghadapi kebencanaan. Pengetahuan yang terbentuk, tidak terlepas dari terbentuknya berbagai pengalaman kehidupan bersama dalam menyikapi berbagai kebencanaan yang dialaminya secara integral bagi kelangsungan sistem sosial pendukungnya.

Namun tanggapan masyarakat ketika bencana terjadi, sikap yang ditunjukkan masih bersifat temporal maupun kondisional. Sementara yang perlu dilakukan yang terkena bencana; akumulasi bantuan yang berkesinambungan, sinerginitas pemberdayaan agar bisa mandiri, serta kepedulian kebencanaan pada masyarakat terhadap kesiapan dalam pengetahuan datangnya kebencanaan. Bagaimana kemampuan mengatasi setiap kebencanaan, menurut Edi² kemampuan pemberdayaan sebagai upaya penanggulangan keterpurukan dan teralienasi pada komunitas yang sedang terkena bencana. Kesadaran masyarakat yang sedang terkena musibah bencana musiman maupun bencana wabah dan alam, merasakan terhibur jika tanggapan yang dibutuhkan saat bencana datang segera. Selanjutnya bagaimana untuk bangkit dan mandiri, seringkali terabaikan. Seiring dengan fakta empiris tersebut, perlu dilakukan pemberdayaan melalui pengamanan dan penguatan potensi masyarakat dengan berbagai kelompok secara menyeluruh. Sejalan dengan pendapat Nasikun³ dalam memobilisasi kesadaran solidaritas

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)

³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Nasikun: CV Rajawali perss, 1995)

masyarakat yang sedang terkena kebencanaan, perlu dilakukan melalui pendekatan fungsional dalam derajat kekesinya. Asumsi yang dikemukakan tidak terlepas dari keseimbangan terhadap kehidupan bermasyarakat, tergantung pada berbagai kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, didorong kesadaran untuk kembali fungsi pada masing-masing kelompok untuk dipersatukan. Sebab konstruksi sistem sosial sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas pada wadah kelembagaan yang saling melengkapi dan membutuhkannya.

Artinya; setiap peristiwa kebencanaan, pengetahuan masyarakat dan tindakan yang dilakukan, berlandaskan pada kolaborasi ajaran-ajaran nilai-nilai keagamaan, tata alam lingkungan dan budaya masyarakat sebagai bentuk kesadaran datangnya kebencanaan sebagai satu kesatuan siklus fenomena kehidupan yang akan selalu ada. Kebijakan publik sebagai penyelenggara dan menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, diharapkan dapat mengatur persiapan hingga pemulihan dengan meminimalkan dampak kebencanaan. Peralatan dan perlengkapan setiap kebencanaan yang berlangsung, perlu diatur dan dirancang terperinci, kemudian diorganisir hingga pada evaluasi pelaksanaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak hanya terbatas pada sifat impresif, fasilitatif dan instruktif, tetapi dapat mengembangkan pada pola persuasif dan akomodatif dari masing-masing model kebencanaan yang disesuaikan dengan berbagai nilai yang berlangsung di wilayah kebencanaan. Sebab mudah terkondisikan adanya *disorder* maupun *disorganisir*, yang pada akhirnya derajat kohesi integrasi semakin rendah. Penataan kehidupan menurut Talcott Parsons diawali bagaimana masyarakat menyadari terhadap kemampuan mengadaptasi terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Karena kemampuan ini akan diketahui akan sistem yang melingkupi terdiri pada lingkup sosial untuk berinteraksi sosial. Mengingat kebencanaan sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga, perlu memperhatikan masyarakat yang terkena dan pelaksana kebencanaan diharapkan mampu menyikapi sesuai dengan peran dan status, sehingga terkondisikan kerjasama yang saling mendukung. Itupun tidak terlepas dari ikatan komunal masyarakat terkena kebencanaan, kesadaran akan tindakan yang dilakukan setiap pelaksana penanggulangan bencana secara kooperatif dan profesional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kesadaran untuk bekerjasama tidak terlepas dari sinergi antara kemampuan pengetahuan akan tanda-tanda alam, kepedulian terhadap penderitaan musibah kebencanaan,

keikhlasan membantu dan menerima musibah dengan merapatkan jejaring sebagai letusan.

Di masyarakat, ada berbagai macam kelompok dan instansi yang melakukan sejumlah aktivitas dalam suatu kegiatan. Seperti instansi pemerintah baik vertikal maupun fungsional yang dibentuk untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas dan kewajiban, dalam menyejahterakan dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat. Begitupun kelompok-kelompok yang merupakan unsur organisasi massa maupun organisasi sosial yang bersifat sukarela maupun memiliki tujuan dan manfaat kehidupan bermasyarakat. Bentuk aktivitas operasionalnya menurut Komisi PBB urusan Pengungsi (2004) menyatakan bahwa setiap melaksanakan urusan penanganan kebencanaan perlu dilakukan beberapa langkah tindakan yang berorientasi pelayanan dan penyembuhan (*treatment*), pendampingan (*advokasi*) serta pendidikan dan penyuluhan (*edukasi*). Sebab kondisi kehidupan masyarakat sedang mengalami traumatis ketika mengalami kebencanaan. Bahkan derita yang dialaminya tidak hanya dirasakan pada saat kebencanaan itu berlangsung, tetapi akan membekas sepanjang hidupnya, sehingga melihat masa depannya selalu dalam kondisi yang selalu ketakutan.

Langkah awal yang dilakukan sesudah kebencanaan itu berlangsung, memberikan pelayanan kesehatan dan akomodasi yang dibutuhkan, kemudian, perbaikan berbagai kondisi kerusakan segera diperbaiki baik tata lingkungan maupun tempat tinggal. Kendala yang sering terjadi pada pelaksanaan pasca bencana. Penyaluran seluruh bantuan yang ada belum dikelola dengan model pemberdayaan berbagai kelompok aktivitas yang berorientasi: pelayanan dan penyembuhan, pendampingan serta pendidikan dan penyuluhan hingga warga masyarakat yang terkena musibah bencana bisa bangkit dan mandiri dengan kehidupan yang lebih baik. Masih bersifat parsial belum *integrated holistik*, tidak menutup kemungkinan yang terjadi disaat kebencanaan berlangsung. Sementara usaha memberdayakan agar mendapatkan kontrol dan sumber daya yang dibutuhkan bagi keberlangsungan kemajuan sosial-ekonomi masyarakat. Mekanisme pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dengan tujuan memberantas kemiskinan melalui pembangunan kebersamaan (*neighborhood development*), meminimalisasi ketergantungan pada bantuan (*autonomous development*), dan bersifat berkesinambungan (*sustainable development*). Begitupun instansi yang terkait sebagai

pelaksana implementasi kebijakan bencana masih ditemukan tumpang tindih dalam pelaksanaan dan pemberian legitimasi. Akibatnya sering ditemukan penanganan dan penanggulangan bencana lebih bersifat demonstratif saat bencana terjadi, dan derajat partisipasinya rendah. Sebab partisipasi semua pihak dianggap sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan, melalui keterlibatan aktif komponen masyarakat secara terprogram.

Kerjasama dalam sistem interaktif dan sistem tindakan dalam sinerginitas instansi terkait dan organisasi massa maupun organisasi sosial perlu menjadi perhatian. Dengan adanya kesamaan nilai dan kewajiban moral dalam menangani musibah pasca bencana, dalam usaha yang memenuhi harapan dapat berperan secara efektif tanpa harus terikat tempat, bentuk aktivitas maupun aliran-aliran SARA yang melatarbelakangi demi kebersamaan dan rasa memiliki kewajiban dan tanggungjawab. Langkah strategis dalam pelaksanaan secara menyeluruh, perlu dilakukan pengawasan dan kepemimpinan dalam gerak operasional secara profesional. Landasan utama profesionalisme untuk gugus kendali penanganan pasca bencana dalam sistem interaksi melalui komunikasi. Komunikasi kelompok pemberi pelayanan dan penyembuhan, pendampingan serta pendidikan dan penyuluhan dengan mempergunakan media dan peralatan modern yang dibutuhkan dewasa ini, agar kelancaran dan keterpaduan akan tercapai. Pada setiap informasi yang dibutuhkan kelompok-kelompok kepentingan dan instansi terkait, organisasi massa dan organisasi sosial dapat menyusun laporan pada setiap level dan jangka waktu tertentu. Sarana dan prasarana dapat digunakan secara maksimal, untuk membantu penanganan dan penanggulangan berbagai bencana. Timbulnya kemacetan dan kendala pada komunikasi kelompok-kelompok kepentingan pada pasca bencana, berhubungan dengan kemampuan tidak bisa menyusun program-program yang diperlukan secara simultan pada lapisan menengah ke bawah. Menyebabkan penyusunan kebijakan yang berorientasi pada tujuan penanggulangan bencana, tidak menyentuh pada target pencapaiannya. Optimalisasi komunikasi, dapat dilakukan tergantung pada berbagai orientasi pendekatannya. *Pertama*: Orientasi pada orang, diharapkan agar diperoleh adanya kesamaan persepsi bahwa penanggulangan kebencanaan merupakan upaya penderitaan yang dialami akan diatasi dan dirasakan bersama. *Kedua*: orientasi pada proses, bahwa penanggulangan kebencanaan membutuhkan waktu dan kerjasama secara sinergis dan berkesinambungan. Sebab apapun

yang dilakukan, tidak bisa dalam waktu yang singkat, dan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. *Ketiga*; orientasi pada pada tujuan lebih pada upaya penanggulangan kebencanaan tidak terlepas pada penataan kembali apa dan bagaimana pasca kebencanaan menjadikan kehidupan dan tata lingkungan yang lebih baik. *Keempat*; Orientasi pada tindakan yang lebih berhubungan dengan menyikapi dan berperilaku yang sesuai dengan penghidupan yang lebih baik dan terintegrasi. Ada pun sistem tindakan dalam sinerginitas berbagai kelompok kepentingan, dipertegas terhadap tanggung jawab, aturan main dan pembagian tugas kepada kelompok kepentingan. Di lokasi pasca bencana untuk tetap memperhatikan masalah relokasi, penanganan stress, sosialisasi pencegahan dan pembangkitan semangat untuk mandiri menjadi skala prioritas.

Peningkatan harkat dan martabat masyarakat terkena bencana melalui kesadaran untuk berkehidupan yang lebih baik akan mempersiapkan diri kemungkinan bencana musiman dan bencana wabah maupun alam semesta. Langkah strategis dengan menyadarkan terhadap indikasi tiap akan datang bencana alam yang didahului adanya fenomena alam dan menjaga kelestarian kehidupan ekosistem antara manusia dengan alam lingkungannya. Upaya yang dapat dilakukan dari kelompok-kelompok kepentingan mendapatkan legitimasi dalam operasinya dan instansi dan aparat pemerintah baik pusat maupun daerah merentangkan gugus kendali antar instansi terkait, menyederhanakan proses dan prosedur, serta kejelasan kerja yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan derajad kategorikal bencana.

Jejaring Sosial sebagai Strategi Pertahanan Hidup

Nilai-nilai yang berada di setiap masyarakat yang berorientasi afeksi dan tujuan, hendaknya selalu dilestarikan untuk memperkuat dan memperkokoh kehidupan bermasyarakat. Di samping itu perlu dipersiapkan suatu program siaga bencana melalui tiga tahap yang perlu diperhatikan, yaitu: tahapan sebelum kebencanaan, tahapan siaga saat bencana dan tahapan sedia setelah bencana.

Tahapan sebelum kebencanaan, kenalilah setiap resiko kebencanaan untuk menghindarinya dan memperkenalkan jalur-jalur menuju *selter-selter* evakuasi yang telah dipersiapkan. Tahap ini memerlukan pengetahuan ciri-ciri dan tanda-tanda kebencanaan itu muncul, untuk antisipasi resiko yang paling minimal melalui sosialisasi kesadaran akan tata kelakuan dan tata lingkungan yang menyebabkan

kebencanaan. Di samping itu perlu memperkenalkan bagaimana menyampaikan tanda-tanda kebencanaan yang akan terjadi secara bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang kompeten, melalui media komunikasi *hotline service* yang telah dipersiapkan secara sinergi oleh BNPB.

Tahapan siaga saat bencana tidak terlepas pada pemberitahuan peringatan dengan waktu yang paling tepat secara impresif dan kooperatif oleh BNPB, untuk diambil langkah dan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi kebencanaan, mengetahui jalur evakuasi, mengetahui cara mendapatkan informasi setiap perkembangan kebencanaan, serta memberitahu pemberian pertolongan bagi kelompok rentan secara meluas.

Tahapan siaga setelah bencana melalui inventarisasi dan identifikasi untuk siap memberikan informasi kondisi kerabat, kelompok dan keluarga yang terkena kebencanaan baik kerusakan fisik, lingkungan, maupun materi. Bersama dengan kelompok dan instansi berwenang, dilakukan penataan kembali dan memperbaiki situasi-kondisi melalui pemberdayaan masyarakat agar bias kembali mandiri. Setiap penanganan pasca bencana, muncul berbagai kelompok kepentingan baik kriminal, politik maupun ekonomi yang merugikan pihak-pihak berwenang yang sedang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan secara melembaga. Strategi survival menurut Heyzer (1986) secara vertikal, perumus dan penentu kebijakan bencana untuk senantiasa tanggap dan peduli dengan memberi peluang leluasa bagi kelompok pelaksana lapangan, baik dalam pendanaan, prosedur dan sistem di samping memberi subsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkena musibah hingga mandiri. Secara horizontal, memperkuat kerjasama dengan kelompok-kelompok kepentingan seperti lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), koperasi maupun Badan Perkreditan Rakyat (BPR), Tim SAR, lembaga-lembaga bantuan, sukarela bagi musibah bencana untuk diberi legitimasi yang jelas sesuai dengan program kerja yang diminati, sehingga mempercepat pemberian pelayanan dan penyembuhan, pendampingan serta pendidikan dan penyuluhan. Secara kekerabatan menghimpun dan menyalurkan bantuan materi dan materiil masyarakat terhadap kepedulian bencana secara terorganisir, sehingga mencegah terjadinya situasional tanpa memberi umpan tetapi terlaksana secara berkesinambungan dan efektif hingga mandiri. Bentuk-bentuk kekerabatan yang sudah ada seperti pola orangtua

asuh, kemitraan, pola bapak angkat, kelompok-kelompok bergulir penerima bantuan dan pinjaman tanpa bunga dan sebagainya; perlu dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan masyarakat terkena bencana tanpa meninggalkan akar budaya setempat. Seiring dengan pendapatnya Paul B. Horton⁴ setiap kebencanaan membawa dampak berlangsungnya perubahan sosial, baik terhadap struktur masyarakat, dalam hubungan sosial yang traumatis maupun tata lingkungan yang berubah. Langkah tepat guna dan tepat sasaran dalam situasi rehabilitasi dan rekonstruksi, tergantung pada pemberdayaan dalam memperkuat *capacity building*. Semangat bangkit dan percaya diri dalam musibah kebencanaan, mempermudah dalam *recovery* kehidupan yang lebih baik dan kuat.

Penutup

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penanganan bencana di Indonesia sebagai berikut; (1) harus ada instansi khusus di pusat meskipun dengan anggaran, SDM, sarana dan prasarana yang terbatas dan (2) jaringan (*networking*) yaitu perlu dibenahi sistem jaringan yang bagus agar berbagai bantuan baik pada sektor swasta maupun pemerintah bisa bekerja sama untuk mengaturnya agar tidak terjadi penumpukan bantuan yang datang dari berbagai pihak yang tidak adil. Misalnya, yang memiliki jaringan banyak tentu saja akan memperoleh bantuan yang jumlahnya besar dan disisi lain yang tidak punya jaringan takan memperoleh bantuan yang kecil. Kasus gempa di Yogyakarta menyisakan problem yang sangat berat kaki patah, gagar otak dan lain-lain tentu saja butuh dana yang sangat besar, kursi roda pendampiang dan perawatan yang sangat panjang dan dana terus-menerus harus dikururkan barangkali sampai 5 tahun kedepan. Jika terjadi tsunami di Aceh dan sebagian besar mati justru jauh lebih mudah dalam pengananya.

Penguatan penanganan pasca bencana tanpa langkah profesional baik melalui sistem interaksi dan sistem tindakan sesuai dengan struktur yang ada dapat dikatakan sebagai jejaring sosial. Ketangguhan dan ketegaran masing-masing kelompok dan individu, sebagai pijakan dalam *manage* keragaman kepribadian di lokasi kebencanaan. Oleh karena itu penguatan kelembagaan dalam kebersamaan kehidupan, berlandaskan pada nilai-nilai religi seperti cinta kasih, tawakal, sabar dan

⁴ Paul B Horton dan Chester L, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1992)

nilai-nilai luhur seperti; peduli, tanggap, trampil maupun menenggang sebagai modal dalam menyikapi setiap musibah kebencanaan. Tidak terlepas semangat lokalitas dalam menghadapi kebencanaan, kelompok-kelompok kepentingan sebagai partner kerja pemerintah, sudah tentu terdapat rasa memiliki dan rasa kebersamaan untuk berkarya pada masyarakat jejaring sosial yang perlu semakin ditonjolkan.

Daftar Bacaan

- Anderskov, Christina, (2004), *Antropology and Disaster*. www.anthrobase.com
- Bourdieu, P., (2006), *The Form of Capital*, In J. Richardson (ed). *Handbook of Theory and Research for Sociology of Education*, New York: Greenwood press
- Henslin, James M, (2006), *Sosiologi dengan pendekatan Membumi* jilid 1 dan 2, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Horton, Paul B., Chester L, (1992), *Sosiologi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Irving M. Zeitlin, (1995), *Memahami kembali Sosiologi*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, (2004), *Buku Pegangan Kedarutatan*, United Nation High Commissioner for Refufugeers, Geneve
- Korten, Davit C., (1993), *Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan agenda Global*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Masykury.M., (2006), *Etika Lingkungan: Solusi Menghadapi Mentalitas Frontier*, www.info-lab.online.com
- Nasikun, (1995), *Sistem Sosial Indonesia*, CV Rajawali perss, Jakarta
- Oliver-Smith, Anthony, (2006), *Disasters and Forced Migration in the 21st Century*, www.understandingkatrina.org.
- Suharto, Edi, (2006), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung
- Usman, Sunyoto, (2004), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta